

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mempunyai misi menjadikan warga Negara yang baik dan cerdas dengan meningkatkan kemampuan peserta didik secara keseluruhan baik pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dibentuk suatu model pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotik. Pembelajaran lebih fokus kepada hasil belajar dari pada proses belajar, sehingga berdampaknya terhadap dilakukannya berbagai cara untuk memperoleh nilai tinggi secara kuantitatif, dibandingkan dengan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada kualitas.

Pembinaan perilaku demokratis siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku demokratis siswa. Dalam pelaksanaannya, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang guru. Guru dituntut memiliki keyakinan, pemikiran, prinsip, dan konsepsi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. Kenyataan dalam proses pembelajaran masih banyak guru belum menunjukkan arah yang jelas adanya karakteristik keilmuan yang dikembangkan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya.

Pendidik memfokuskan pemahaman anak terhadap materi pelajaran tanpa mempertimbangkan pembentukan karakter anak terhadap materi pelajaran tanpa melihat karakter anak sebagai efek nilai akhir, akibatnya kurang mendorong terjadinya peningkatan anak dan berperilaku demokratis

Kemampuan berperilaku demokratis mempunyai konsep yang bebas, proses transparan dan dengan sistematis, akibatnya membuat peserta didik menyimak informasi dengan mudah dimengerti.

Menurut Wantoro (2008:220) bahwa:

“Selama ini di Sekolah Menengah Pertama sudah dilaksanakan pendidikan demokrasi melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ataupun mata pelajaran sebelumnya, PPKn, PMP, ataupun *Civics*, terlihat adanya perilaku demokratis yang ditunjukkan siswa disekolah (disalam kelas dan diluar kelas atau lingkungan sekolah). Perilaku yang tampak didalam kelas diantaranya ketika sedang proses belajar mengajar berlangsung terutama dalam diskusi siswa terlihat berani memberikan pendapat, menghargai pendapat teman teman dan mau mendengarkan temannya yang sedang memberikan pendapat. Sedangkan perilaku demokratis siswa yang tampak dari luar kelas atau lingkungan sekolah, antaranya bebas berpendapat dalam rapat OSIS, adanya kerjasama antar individu atau kelompok dalam menyelesaikan masalah, adanya kepercayaan kepada guru, kepala sekolah dan staf petugas sekolah.”

Sesuai pendapat ahli diatas, maka pendidikan dalam hal ini diwajibkan untuk membuat manusia yang disiplin, mampu mengasikkan sesuatu yang baru, dan berperilaku demokratis. Dalam Undang Undang No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No 20.Tahun 2003 Tentang Sisdiknas ), khususnya:

- a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis secara bertanggungjawab, dan

- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan sebagai berikut. “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Secara universal sikap peserta didik yang memperlihatkan kurangnya ketidakdisiplinan terhadap peraturan sekolah seperti contoh: menyontek saat ulangan harian, kurangnya mematuhi tata krama dan sopan santun, mengerjakan tugas atau PR tidak tepat waktu bahkan lebih luas lagi makin maraknya perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak usia sekolah. Kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut perlu disikapi dengan bijak, terutama dalam pembinaan generasi muda dilingkungan sekolah, termasuk dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode atau model pembelajaran dalam penyampaian materi pelajaran yang mengandung muatan nilai sehingga dapat diterapkan pada diri peserta didik tentang hakekat pendidikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari.

Sejalan dengan meningkatnya perubahan yang bersifat multidimensional (beragam) baik, politik ekonomi maupun sosial budaya, tuntutan pemikiran kritis dan tindakan pemikiran kreatif serta berperilaku demokratis adalah mutlak diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Berdasarkan

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ru ang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seperti di ungkapkan Winataputra (2008:8) bahwa :

Paradigma pendidikan demorasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada:

1. pandangan yang *pluralistik-uniter* (bermacam macam tapi tetap satu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika.
2. Sikapnya dalam menempatkan individu, Negara dan masyarakat global secara harmonis.
3. tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional dan sosial).
4. konteks (*setting*) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Apabila dilihat dalam penerapan program pendidikan, paradigma baru ini menuntut memberikan perhatian yang lebih hati-hati dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia.

Dalam situasi ini , maka Pendidikan Kewarganegaraan juga sebagai bagian keseluruhan dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan pendidikan pada umumnya memiliki peran penting karena “ mata pelajaran ini secara etimologis pada awalnya dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* antara lain

mengembangkan nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan Negara hukum” (Al Muchtar, 2000:19).

Dari permasalahan diatas, Pendidikan Kewarganegaraan disekolah sangatlah penting, yakni untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dasar dan nilai-nilai demokratis, sehingga dalam diri siswa tumbuh kesadaran berdemokrasi dan berperilaku demokratis yang diperlukan guna menegakkan Negara hukum. Sebagai contoh sikap Demokrasi siswa disekolah ditunjukkan dengan adanya sikap yang demokratis siswa seperti contohnya:

1. Pemilihan Ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS disekolah
2. Bergantian menjadi petugas upacara saat disekolah
3. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan OSIS
4. Menghormati sesama teman yang berbeda ras, suku, dan agamanya saat disekolah
5. Aktif dalam diskusi kelompok saat melakukan pembelajaran dikelas

Pendidikan Kewarganegaraan dengan karakteristik konsepnya yang abstrak, kompleks dan simbolik diharapkan jadi wadah untuk mengembangkan ketrampilan kritis dan berperilaku demokratis siswa. Mengingat perannya yang strategis, maka diperlukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baik dan berkualitas. Melalui pembelajaran ini guru dituntut untuk dapat membimbing siswa berpikir kritis dan berperilaku demokratis dan menuntut mereka menghubungkan materi yang diterima dikehidupan sehari-hari. Untuk itu siswa perlu berpikir yang demokratis dan memilih pendidikan dan pengajaran

kewarganegaraan secara bebas karena merupakan suatu hak siswa (Pasal 28 E tentang Hak Azasi Manusia ).

Guru memiliki peran untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran serta tersedianya media, sarana, dan prasarana pembelajaran. Sehingga guru PKn harus professional dalam memilih metode yang bervariasi dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif (metode atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan), mulai dari persiapan dan perencanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran sampai pada tahap evaluasi, yang semuanya tentunya mengarah pada situasi dan kondisi pembelajaran yang demokratis sehingga dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dilingkungan sekolah. Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat kesadaran berdemokrasi pada siswa SMP kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Rendahnya sikap dan perilaku berdemokrasi peserta didik disekolah
2. Guru lebih memfokuskan pada pemahaman kognitif siswa tanpa mempertimbangkan pembentukan karakter peserta didik
3. Perilaku peserta didik yang menunjukkan kurang disiplin terhadap aturan disekolah

4. Peran guru yang lebih professional dalam memilih metode yang bermacam-macam dalam menyelenggarakan pembelajaran yang demokratis.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam mempermudah kajian teoritis dan adanya keterbatasan penulis, maka penulis membatasi pada permasalahan **“Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Nasrani 2 Medan”**.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap dan perilaku peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran?”

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap dan perilaku peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran”

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Teoritis**

Adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam pendidikan terutama mengenai pembelajaran PPKn dalam

pengaruh kesadaran dalam berkonstitusi peserta didik dan juga menambah pengetahuan tentang pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat demokrasi siswa kelas VIII di SMP Nasrani 2.

## 2. Praktis

Sedangkan secara praktis mamfaat yang diperoleh adalah:

### a. Siswa

Untuk mengembangkan kesadaran siswa untuk berpartisipasi secara aktif, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, membangun kesadaran siswa untuk bekerjasama dalam memecahkan permasalahan bersama, membangun kesadaran siswa untuk berperan serta dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran yang konstruktif (membangun) terhadap kebijakan publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### b. Guru

Sebagai bahan masukan guru Pendidikan Kewarganegaran dalam mengembangkan dan pembinaan perilaku demokratis peserta didik atau kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, sikap dan ketrampilan sosial dalam proses kegiatan belajar disekolah.

### c. Sekolah

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah, khususnya guru PKn dalam pemilihan metode belajar peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

### d. Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1. Pendidikan Kewarganegaraan**

###### **1.1.1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006: Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Istilah yang sering digunakan selain PKn adalah *civics*. Menurut Henry Randel Waite (1886) merumuskan pengertian *civics* sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan:

- a. Perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, organisasi ekonomi, organisasi politik).
- b. Individu dengan Negara.

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *civics* adalah *citizenship*. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dalam pendidikan formal untuk melatih sikap moral peserta didik agar memiliki karakter dan berkepribadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai pancasila. PKn sebagai wadah pelatihan perilaku pada siswa juga dimaksudkan untuk membekali

siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan Negara yang dapat dipercayakan oleh bangsa dan Negara.

Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu dari lima tradisi pendidikan ilmu pengetahuan sosial yakni *citizenship transmission* (pembelajaran IPS disekolah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah dipilih agar peserta didik dapat menjadi warga Negara yang baik), saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) yaitu aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu yang memusatkan pada seluruh dimensi psikologi, dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan teori atau penemuannya intinya diperkaya dengan disiplin ilmu lainnya yang berarti mempunyai keterlibatan kebermamfaatan terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga Negara dalam konteks sistem pendidikan nasional.

#### **1.1.1.2 Konsep pembelajaran Kewarganegaraan**

Tujuan Pendidikan Nasional sebagai mana telah dirumuskan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan seseorang yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan

efektif serta dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan peradaban dunia

### **1.1.1.3 Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan**

Djamarah dan Zain (Ihsan, 2017:53) menyatakan bagian-bagian karakteristik pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai berikut:

- a) Menekankan pada pemecahan masalah
- b) Bisa dijalankan dalam berbagai konteks
- c) Mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri
- d) Mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda
- e) Mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan kegiatan ilmiah
- f) Memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang dipelajari
- g) Menerapkan penilaian otentik (metode penelitian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah)

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan yang lainnya. PKn sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakteristik PKn ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini.

Adapun karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah:

1. PKN termasuk dalam proses ilmu sosial (IPS)
2. PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi
3. PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela Negara, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pembayaran pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek Persatuan dan Kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, Hak Asasi Manusia, kebutuhan warga Negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila dan Globalisasi.
5. PKN memiliki saran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga Negara.
6. PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wadah utama pendidikan demokrasi di Indonesia.
7. PKN mempunyai 3 pusat perhatian yaitu *Civic Intellegence* ( kecerdasan dan daya nalar warga Negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial ), *Civic Responsibility* ( Kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara yang bertanggungjawab ), *Civic Participation* (Kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya , baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan.

8. PKn mengenal suatu model pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-mengajar yang membina sikap atau nilai moral ( aspek afektif ).

Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Keberadaan PKn dengan karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen pendidik dan Negara. Hal ini disebabkan karena PKn banyak melanggar nilai-nilai pada peserta didik. Nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, pengorbanan, menghargai orang lain dan persatuan ini jika ditanamkan dalam diri peserta didik bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan Negara.

#### **1.1.1.4 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Secara sederhana tujuan PKn adalah membentuk warga Negara yang lebih baik (*a good citizen*) dan mempersiapkan untuk masa depan (Cholisin, 2004:12). Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang warga Negara sehingga ia mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- a) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membuat diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya.
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencatutan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **1.1.1.5 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan**

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia yang meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib disekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan Peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- c) Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia yang tidak dapat dicabut atau diganggu oleh siapapun, Meliputi: Hak dan

kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM.

- d) Kebutuhan warga Negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga Negara.
- e) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia , Hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
- f) Kekuasaan dan politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam kehidupan sehari-hari.
- g) Pancasila meliputi: Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan idologi Negara, Proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- h) Globalisasi adalah suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu maupun masyarakat di daerah jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang meliputi: Globalisasi dilingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan Internasional dan Organisasi internasional dan Mengevaluasi globalisasi.

### 1.1.1.6 Prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan

Prinsip dasar pembelajaran PKn mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Menurut pendapat Budimansyah (2002:8) prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (*student active learning*), kelompok belajar kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (*reactive learning*).

#### a) Prinsip Belajar Siswa Aktif

Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir diseluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan dikelas, kegiatan lapangan dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (*brain storming*). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, disamping tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpulan, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

#### b) Kelompok Belajar Kooperatif

Proses pembelajaran PKn juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain disekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama.

c) Pembelajaran Partisipatorik

Selain prinsip pembelajaran di atas PKn juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil melakoni (*learning by doing*). Salah satu bentuk pelakonan ini adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemorasi.

d) Reactive Teaching

Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar peserta didik mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus membuat materi pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, guru harus kreatif supaya pelajaran yang diajarkannya tidak membosankan, guru harus mencari cara untuk menanggulangnya. Inilah tipe guru yang reaktif itu.

Ciri-ciri guru yang reaktif itu diantaranya sebagai berikut:

1. Menjadi siswa sebagai pusat kegiatan belajar
2. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami peserta didik
3. Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar peserta didik dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan peserta didik
4. Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat peserta didik bosan. Bila hal ini ditemukan, guru segera menanggulangnya.

### 1.1.1.7 Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran PKn

#### a) Pengertian Nilai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu ini bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi bukan objek itu yang disebut nilai, dengan demikian nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (Dwi Listyan dan Irton, 2011:4). Muchson (2002:16) mendefinisikan nilai yang dalam bahasa Inggris adalah value bias diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu.

Notonegoro (dalam Kaelan, 2000:12) menyebutkan adanya 3 adanya macam nilai. Ketiga nilai itu adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai diatas masih bersifat abstrak, atau disebut nilai dasar, karena nilai ini masih berada dalam pikiran manusia. Nilai dasar kemudian dijabarkan secara interpretasi menjadi nilai instrumental yang berupa parameter yang lebih konkret, yang berupa rumusan umum berwujud norma-norma.

**b) Nilai-nilai Pancasila**

Pancasila adalah daer statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntut (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribasian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa (Yudi Latif, 2011:41).

Sedangkan secara entitas, Pancasila itu sendiri pada hakekatnya adalah nilai (Kaelan, 2000:12).

Yudi Latif (2011:42) menjelaskan pokok-pokok dalam Pancasila yaitu pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiutas) sebagai sumber etika dan spiritualitas, diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bias memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia. Ketiga, Negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Keempat, Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Kelima, keadilan sosial yang dikehendaki Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antar peran manusia sebagai makhluk individu dan

peran manusia sebagai makhluk sosial juga keseimbangan antara pemenuhan hak dan sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

## **2.1.2. Perilaku Demokratis**

### **1.1.1.8 Konsep Perilaku**

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, sampai yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan (Oktaviana, 2015). Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010).

Sedangkan menurut Wawan (2011) perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang berinteraksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan secara terus-menerus ataupun kebiasaan individu.

#### **2.1.2.1.1 Jenis-Jenis Perilaku**

Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana (2015):

- 1) Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf
- 2) Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan (merupakan kemampuan diluar kemampuan orang tersebut secara otomatis)

- 3) Perilaku tampak (seperti contoh berpaakaian, bereaksi) dan tidak tampak (merupakan perilaku yang tidak bias ditangkap oleh indera namun harus menggunakan alat pengukur tertentu seperti psikotes atau berpikir tanggapan sikap persepsi emosi dalam psikologi)
- 4) Perilaku sederhana dan kompleks
- 5) Perilaku kognitif (yang berkaitan dengan aspek intelektual atau yang berpikir yang terdiri dari pengetahuan), afektif (merupakan perilaku yang berhubungan dengan sikap dan juga nilai), dan psikomotor (merupakan perilaku yang berhubungan dengan ketrampilan atau skill)

#### **1.1.1.9 Bentuk-Bentuk Perilaku**

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Perilaku pasif/Perilaku tertutup (*cover behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, yang belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

- 2) Perilaku Terbuka (*overt behavior*)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

## 2.1.2.2 Konsep Demokrasi

### 2.1.2.1.2 Sejarah dan Pengertian Demokrasi

Perkataan demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demokratia*” yang artinya sama dengan *government by the people*. Asal katanya “*demos*” dan “*cratein*” yang berarti “rakyat” dan kekuasaan”. Menurut Hertz: “demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogatif politik atas orang lain. Jadi pemerintahan yang pada umumnya dilakukan oleh semua untuk semua sebagaimana dilawankan terhadap kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok tertentu”. (*democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over anyother. Government is thus the rule of all over all in the common, as opposed to in the individual or separate group interest*).

Menurut Joseph A. Schemer : “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif”. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat meskipun secara operasional implikasinya diberbagai Negara tidak selalu sama.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara. Demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara kota Yunani berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah Negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk lebih kurang 300.000 orang dalam suatu Negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk.

#### **2.1.2.1.3 Kesadaran Berkonstitusi**

Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalkan, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Selain itu, kita dapat menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Berkaitan dengan dengan hal itu, (Winaputra 2007:21-23) mengemukakan beberapa asumsi mengenai perlunya penguatan konsep mengenai kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan berkonstitusi, diantaranya:

- a) Komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003) memerlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi peserta didik disekolah ) dan sosio-andralogis (fasillitas pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hidup dalam konteks kehidupan berkonstitusi.
- b) Transformasi demokrasi dalam kehidupan berkonstitusi Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi, dan tepat konteks agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya sebagai warga Negara yang sadar konstitusi, cerdas, demokratis, berwatak dan berkeadaban
- c) Pendidikan konstitusi yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal, non formal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak dan berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan

model pendidikan berkonstitusi yang secara teoritis dan empiris valid, dan secara kontekstual handal untuk kehidupan demokrasi di Indonesia.

- d) Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan berkonstitusi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*) yang didalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk membangun demokrasi konstitusional (*education about, through, and for democracy*)
- e) Untuk mendapatkan model pendidikan berkonstitusi dalam rangka pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis akseptabel dan handal, diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan masukan dan proses guna menghasilkan perilaku warganegara Indonesia yang sadar dan hidup berkonstitusi menurut UUD 1945.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. SMP Nasrani 2 merupakan suatu lingkungan yang sangat kondusif dan memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan sekolah. Perlu diketahui bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dilingkungan sekolah haruslah menggunakan cara demokrasi yang sehat, adil, bersih, dan tidak ada permusuhan.

Walaupun perbedaan pendapat itu pasti ada selalu kita ingat bahwa perbedaan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang mampu menghargai

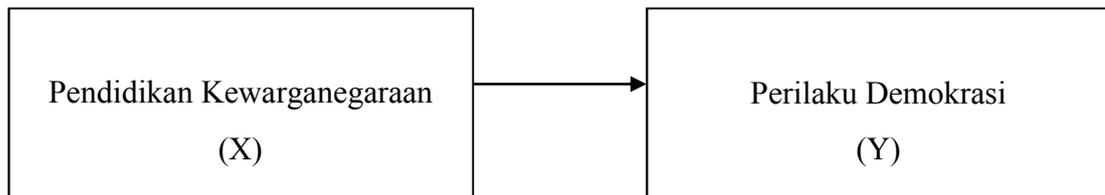
segala perbedaan. Mulai dari perbedaan bahasa, agama, jenis kelamin, keinginan, latar belakang, namun masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetap satu jua).

Pendidikan demokrasi disekolah merupakan satu lingkungan yang sangat kondusif dan memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan sekolah. Sejarah menunjukkan bahwa pemuda dan mahasiswa selalu menjadi bagian yang sangat penting dari demokrasi sebagai pelopor, penggerak bahkan pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan pada era Sumpah Pemuda 1928, pergerakan 1945 angkatan 1966 yang membidani Tritura, Malari 1974 dan Reformasi 1998. Peran siswa sering kali sebagai pembawa perubahan atau digelar sebagai "*Agent of Change*".

### **2.3 Paradigma Penelitian**

Untuk memperjelas substansi penelitian, maka variabel penelitian yang akan diukur terlebih dahulu disusun dan digambarkan dalam suatu paradigma penelitian. Menurut sugiyono (2008:42), paradigma adalah pandangan atau model atau pola pikir yang dapat dijabarkan sebagai variabel penelitian, kemudian membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, sehingga dapat memudahkan perumusan masalah penelitian, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang akan diajukan, metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisi data, dan penarikan sampel.

Untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel penelitian, dapat dilihat dalam gambar paradigma penelitian tersebut:



**Gambar: 2.1 Paradigma Penelitian**

*(Sumber: Dikelola oleh peneliti)*

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk warga Negara memiliki tingkat kesadaran berperilaku demokratis yang tinggi. Bertolak dari asumsi tersebut dan mengacu pada pertanyaan penelitian, maka dapat dikemukakan sebuah hipotesis penelitian secara umum sebagai berikut: Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh signifikan dan terdapat perbedaan perilaku demokratis siswa Sekolah Menengah Pertama Nasrani 2 Medan.

Untuk lebih spesifik dan jelasnya, hipotesis tersebut dapat dikembangkan menjadi hipotesis yang lebih khusus dan rinci sebagai berikut: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama berpengaruh positif terhadap perilaku demokratis siswa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Menurut Iskandar (2001:2) penelitian merupakan suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka.

Melalui metode ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut partisipan. Informan adalah orang-orang yang diobservasi, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya mengenai pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap perilaku demokratis siswa.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di SMP Nasrani 2 Medan yang berada di jalan JL. Pendidikan No 88 Tegal Rejo Medan Provinsi, Sumatra Utara.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Mei 2022 pada T.P 2021/2022.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah siswa SMP Nasrani 2 Medan kelas VIII yang berjumlah 108 siswa. Suharmisi Arikunto (2010:112) mengemukakan bahwa “Apabila banyaknya subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Tapi karena di dalam penelitian ini subjeknya lebih dari 100 maka penelitian menggunakan sampel.

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian Siswa Kelas VIII**

| No | Kelas  | Jumlah Siswa |
|----|--------|--------------|
| 1  | VIII-1 | 38 Siswa     |
| 2  | VIII-2 | 34 Siswa     |
| 3  | VIII-3 | 36 Siswa     |
|    | Jumlah | 108 Siswa    |

*(Sumber: Tata Usaha SMP Nasrani 2 Medan)*

#### 3.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian sering kali terjadi permasalahan dalam mengambil responden salah satunya adalah jumlah responden yang terlalu banyak yang menjadi ketertarikan penelitian. Namun dalam jumlah yang sangat banyak dari suatu populasi maka peneliti harus mengambil terlebih dahulu, kemudian data yang terkumpul harus dianalisis. Hasil dari analisis kemudian digunakan untuk merefleksikan keadaan dari populasi tersebut.

Menurut Sugiyono (2018:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Suharsimi Arikunto (2010:117) mengemukakan bahwa Teknik

*Proportional Random Sampling* adalah teknik pengambilan proporsi untuk memperoleh sampel yang representative, pengambilan subjek dari strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dalam masing-masing wilayah. Jumlah populasi siswa SMP Nasrani 2 Medan sebanyak 108 siswa. Dengan menggunakan tabel yang dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiyono 2011:87) untuk tingkat kesalahan 5% dari populasi 108, dengan spesifikasi sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 108 siswa, dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas maka didapat jumlah sampel:

$$n = \frac{108}{108 \cdot (0,0035)^2 + 1}$$

$$n = 84 \text{ orang}$$

Kemudian ditemukan jumlah masing-masing sampel menurut tingkatan siswa berdasarkan kelas secara *Proportipnate Random Sampling* dengan menggunakan rumus:

$$ni = \frac{Ni}{N} n$$

Keterangan

ni = Jumlah sampel menurut Stratum (tingkatan)

n = Jumlah solusi total

N = Jumlah seluruh populasi

Berdasarkan rumus diatas populasi sebesar 108 orang dihasilkan sampel sebanyak 84 orang. Kemudian jumlah sampel menurut masing-masing kelas untuk mewakili sampel dari siswa kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan adalah sebagai berikut

**Tabel 3.2**  
**Daftar Sampel Tiap Kelas**

| No                              | Kelas  | Jumlah Populasi | Proporsi           | Jumlah Sampel |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1                               | VIII-1 | 38              | $84/108 \times 38$ | 30            |
| 2                               | VIII-2 | 34              | $84/108 \times 34$ | 26            |
| 3                               | VIII-3 | 36              | $84/108 \times 36$ | 28            |
| <b>Jumlah Sampel Kelas VIII</b> |        |                 |                    | <b>84</b>     |

(Sumber: Tata Usaha SMP Nasrani 2 Medan)

### 3.4 Variabel Operasional dan Defenisi Penelitian

#### 3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan merupakan konsep atau konstruk yang mempunyai variasi nilai, keadaan, atau kategori. Nilai dari variabel inilah yang menjadi pusat perhatian yang ukur, diuji dan dijelaskan perbedaannya. Dengan kata lain variabel adalah simbol atau lambang yang padanya dilekatkan nilai yang berupa angka.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

1. Variabel Bebas (*Independent*) : Pendidikan Kewarganegaraan (X)
2. Variabel Terikat (*Dependent*) : Perilaku Demokratis (Y)

### 3.4.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan uraian tentang batasan dari variabel yang dimaksudkan atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan.

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam penelitian ini, istilah Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian sebagai *civic education*, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang berkedudukan sebagai salah satu mata pelajaran disekolah. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diarahkan untuk menghasilkan kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa yang meliputi dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan Kewarganegaraan (*civic Skill*), dan watak Kewarganegaraan (*civic diposition*).

Adapun indikator Pendidikan Kewarganegaraan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama Nasrani 2 Medan dengan defenisi operasional sebagai berikut

**Tabel 3.3**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

| Variabel                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Nasrani 2 Medan (X)<br>1. Materi pembelajaran PKn | 1. Kesesuaian materi pembelajan dengan kurikulum<br>2. Kesesuaian materi pelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik<br>3. Materi pembelajaran diangkat dari realitas kehidupan peserts didik |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Materi pembelajaran diorganisasikan dari hal konkrit menuju abstrak</li> <li>5. Materi pembelajaran diorganisasikan dari pengalaman praktis menuju teori</li> <li>6. Materi pembelajaran diorganisasikan dari lingkungan terdekat siswa, lokal, dan internasional</li> <li>7. Materi pembelajaran akurat jika ditinjau dari segi keilmuan</li> <li>8. Materi pembelajaran harus bersifat actual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> |
| <p>2. Metode Pembelajaran PKn</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian metode dengan materi pembelajaran</li> <li>2. Variasi metode yang digunakan</li> <li>3. Metode yang digunakan menuntut peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran</li> <li>4. Metode yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik</li> </ol>                                                                                                                                                                              |
| <p>3. Media Pembelajaran PKn</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan jenis media visual, audiodan audio visual</li> <li>2. Kesesuaian media dengan tujuan dan materi pembelajaran</li> <li>3. Keberfungsian media</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>4. Sumber Pembelajaran PKn</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk sumber pembelajaran :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Materi bacaan</li> <li>b. Materi bukan bacaan masyarakat dan lingkungan</li> </ol> </li> <li>2. Jenis sumber pembelajaran       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sengaja direncanakan</li> <li>b. Sengaja dimanfaatkan</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                       |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Evaluasi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses belajar dan hasil belajar</li> <li>2. Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor</li> <li>3. Penilaian oleh guru, siswa sendiri(<i>self evaluation</i>) dan siswa lain</li> <li>4. Bentuk penilaian tertulis (<i>pencil and paper test</i>) dan berdasarkan perbuatan (<i>performance based assessment</i>), penugasan (<i>project</i>), product (<i>product</i>), atau portofolio.</li> </ol> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Sumber: diolah oleh peneliti)

#### b) Perilaku Demokratis

Adalah perilaku warga Negara yang bersifat individual dan erat kaitannya dengan kepribadian, yang terbentuk sepanjang ia hidup melalui proses sosialisasi, yang mengandung sifat sosial, serba terbuka untuk orang lain, untuk saling memberi dan menerima serta saling menghargai dan lebih mengedepankan unsur normatif pada unsur pribadi.

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk lebih jelasnya indikator-indikator variabel perilaku demokratis siswa (Y) ini seperti yang tercantum dalam table berikut:

**Tabel 3.4**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

| Variabel                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perilaku Demokratis Siswa (Y)<br><br>1. <i>Pro bona publico</i> , yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi atau golongan           | 1. Bergotong-royong<br>2. Mematuhi tata tertib lalu lintas<br>3. Tidak membuang sampah sembarangan<br>4. Menjaga kekayaan sekolah<br>5. Memilih pemimpin atas dasar pertimbangan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan<br>6. Menjaga harta milik publik, seperti telepon umum, ATM<br>7. Menjaga sumber-sumber kekayaan alam seperti mata air, cagar alam dll |
| 2. <i>Pro patricia primus</i> patrialis, yaitu sikap mengutamakan kepentingan Negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk Negara atau kepentingan umum | 1. Membayar pajak, iuran sekolah secara berdisiplin<br>2. Menjaga nama baik sekolah, keluarga dan pemimpin<br>3. Menjaga berbagai simbol kenegaraan seperti bendera Merah Putih, Lambang Negara, Lagu Indonesia Raya, Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden<br>4. Bersedia menjadi relawan sosial bila diperlukan                                                               |
| 3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda                                                                                      | 1. Bersedia mendengarkan pendapat orang lain<br>2. Tidak membenci orang lain dengan pendirian yang berbeda<br>3. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan diri sendiri<br>4. Menghormati orang lain yang berbeda agama untuk menjalankam ibadah sesuai agama dan kepercayaannya                                                                                        |
| 4. Terbuka menerima pendapat orang lain                                                                                                                          | 1. Mendengarkan orang lain sedang berbicara<br>2. Suka meminta pendapat orang lain<br>3. Mempertimbangkan pendapat orng lain                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>yang lebih baik</p> <p>4. Bersedia menerima pendapat yang dinilai lebih baik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Tanggapan dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar | <p>1. Mengakui pandangan yang ternyata keliru</p> <p>2. Memberikan pendapat secara lisan dan atau tulisan</p> <p>3. Bersedia memberikan pendapat secara tulus</p> <p>4. Memberikan pendapat dengan menggunakan tata krama dan santun bahasa yang baik</p> <p>5. Selalu menopang pendapatnya dengan alasan dan argument yang kuat</p>                                                                                                       |
| 6. Bersikap kritis terhadap pendapat orang lain                     | <p>1. Bersikap cermat dalam informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain</p> <p>2. Mendengarkan pendapat orang lain</p> <p>3. Bersedia menggali alasan dibalik pendapat orang lain yang diemukakan</p> <p>4. Bersedia mencari alasan lain yang lebih tepat dari pendapat orang lain</p> <p>5. Menyanggah pendapat orang lain dengan pandangan diri sendiri yang didukung argument yang kuat</p> |
| 7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan          | <p>1. Memilih persoalan dengan cermat</p> <p>2. Mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah</p> <p>3. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang mendukung</p> <p>4. Memilih alternatif pemecahan masalah paling tepat dan layak</p> <p>5. Bersifat antisipatif terhadap keputusan pemecahan masalah yang diambil</p>                                                                                                        |
| 8. Menghormati hak orang lain                                       | <p>1. Tidak mengambil hak orang lain dengan cara apapun</p> <p>2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan hak nya dengan baik</p> <p>3. Selalu menjaga agar tidak mengganggu orang lain</p> <p>4. Tidak mencemooh orang lain karena berbeda bahasa dan budaya</p>                                                                                                                                                        |
| 9. Menghormati kekuasaan yang sah                                   | <p>1. Menjalankan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | peranannya sebagai siswa<br>2. Menghormati pemerintah pusat, daerah dan tokoh panutan dalam masyarakat<br>3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam lingkungan sendiri seperti sekolah dan masyarakat<br>4. Turut melaksanakan kebijakan publik<br>5. Memperlakukan orang lain sesuai kedudukan dan perannya dalam lingkungannya                                                                    |
| 10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif                       | 2. Tidak bersifat kesukuan dan kedaerahan<br>3. Tidak fanatik terhadap golongannya<br>4. Menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri<br>5. Menerapkan prinsip meritokratif yakni pemberian imbalan sesuai dengan prestasi kerja dalam berbagai keuntungan                                                                                                                                |
| 11. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab | 1. Selalu menyampaikan amanat yang diperoleh kepada yang berhak<br>2. Bersedia mengganti sesuatu amanat yang hilang atau cacat karena kecerobohan sendiri<br>3. Melaksanakan tugas yang diberikan guru, Kepala Sekolah dengan baik<br>4. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan cara yang terbaik yang biasa dilakukan<br>5. Berorientasi pada pencapaian hasil yang terbaik dalam pemenuhan tugas |

*(Sumber: diolah oleh peneliti)*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan untuk membuktikan atas keterangan responden. Menurut Sutrisno Hadi (1986) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan meninjau langsung ke SMP Nasrani 2 Medan untuk memperoleh data penelitian.

### 3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diperoleh dari daftar kumpulan nilai siswa semester genap pada Mata Pelajaran PKn di SMP Nasrani 2 Medan.

### 3.5.3 Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2018:199) “Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Dalam penelitian ini, pengaruh pendidikan kewarganegaraan diambil melalui penyebaran angket kepada responden yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban. Alternatif jawaban dari setiap item pertanyaan digunakan dengan skala Likert (digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial), sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Skor Pilihan Jawaban**

| No | Keterangan         | Option | Bobot |
|----|--------------------|--------|-------|
| 1. | Selalu (SL)        | A      | 4     |
| 2. | Sering (S)         | B      | 3     |
| 3. | Kadang-kadang (KD) | C      | 2     |
| 4. | Tidak pernah (TP)  | D      | 1     |

*(Sumber: skala likert)*

### 3.6 Uji Instrumen Penelitian

#### 3.6.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2014:211) “Uji validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahi mempunyai tingkat validasi yang tertinggi, sebaiknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah”. Uji validitas disebut juga uji kesahihan butir suatu item pertanyaan dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap skor total item. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan teknik korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N \Sigma X^2 - (\Sigma x)^2\} \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Dimana:

$r_{xy}$  = Koefisien Validitas Sosial

X = Nilai untuk setiap soal

Y = Nilai total seluruh soal

N = Jumlah responden

Dengan kriteria jika  $r_{hitung}$  dikonsultasikan dengan  $r_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Jika didapatkan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir instrument dapat dikatakan valid akan tetapi sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dikatakan bahwa instrument tidak valid. Untuk mencari r table menggunakan rumus N=30 dan signifikansi 5% maka didapat jumlah table statistik  $r_{tabel}$  pada uji penelitian adalah sebesar 0,361. Adapun hasil uji validitas pada variabel Pengaruh Pendidikan

Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa Kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan yang dilakukan pada tanggal 19 -25 Mei 2022 pada T.P 2021/2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa Kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan**

| Butir    | r hitung | r tabel | Keterangan  |
|----------|----------|---------|-------------|
| Butir 1  | 0,661    | 0,361   | Valid       |
| Butir 2  | 0,375    | 0,361   | Tidak Valid |
| Butir 3  | 0,147    | 0,361   | Tidak Valid |
| Butir 4  | 0,130    | 0,361   | Tidak Valid |
| Butir 5  | 0,362    | 0,361   | Valid       |
| Butir 6  | 0,593    | 0,361   | Valid       |
| Butir 7  | 0,645    | 0,361   | Valid       |
| Butir 8  | 0,731    | 0,361   | Valid       |
| Butir 9  | 0,679    | 0,361   | Valid       |
| Butir 10 | 0,726    | 0,361   | Valid       |
| Butir 11 | 0,866    | 0,361   | Valid       |
| Butir 12 | 0,797    | 0,361   | Valid       |
| Butir 13 | 0,871    | 0,361   | Valid       |
| Butir 14 | 0,867    | 0,361   | Valid       |
| Butir 15 | 0,911    | 0,361   | Valid       |
| Butir 16 | 0,892    | 0,361   | Valid       |
| Butir 17 | 0,913    | 0,361   | Valid       |
| Butir 18 | 0,911    | 0,361   | Valid       |
| Butir 19 | 0,856    | 0,361   | Valid       |
| Butir 20 | 0,906    | 0,361   | Valid       |

(Sumber: hasil pengolahan data SPSS 22)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada uji validitas pernyataan pada angket Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa Kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan diketahui ada tiga (3) Pernyataan yang tidak valid dan selebihnya valid semua.

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2014 : 211) “Reliabilitas adalah suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik”. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten , sehingga instrument ini dapat dipakai dan bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dalam reliabilitas ini menggunakan pengujian melalui aplikasi SPSS (*Statistical Product Service Solution* versi 22). Apabila alpha lebih kecil dari 0,5 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya apabila sama dengan atau lebih besar dari 0,5 maka reliabel.

**Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa Kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan**

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .951                   | 20         |

(Sumber: hasil pengolahan data SPSS 22)

Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,951 lebih besar dari 0,5. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel penelitian tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis data diperlukan suatu teknik atau metode untuk memperoleh kesimpulan yang tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Uraian selengkapnya tentang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **3.7.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan one sample Kolmogorov smirnov dan plot normal yang diperoleh dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 22, normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan ( $\alpha$ ) tertentu (biasanya  $\alpha = 0,05$  atau  $0,01$ ) sebaliknya jika hasil uji normalitas tidak terpenuhi cara mengetahui signifikansi atau tidak dapat dilihat dari kolom signifikan.

#### **3.7.2 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap tingkat kesadaran berdemokrasi siswa kelas VIII di SMP Nasrani 2 Medan. Analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apabila masing-masing variabel berhubungan positif dan negatif. Dalam regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas (X) yang dihubungkan dengan variabel tak bebas (Y). Persamaan umum regresi sederhana adalah  $Y = a + bx$ . Untuk mempermudah peneliti dalam mengelola data, maka peneliti menggunakan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 22.

### **3.8 Uji Hipotesis**

#### **3.8.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t)**

Didalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (masing-masing berpengaruh yang signifikan atau terhadap variabel dependen).

Nilai signifikan  $t < 0,005$  maka dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Untuk mempermudah peneliti dalam mengelola data, maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 22.

### **3.8.2 Uji Keberartian Regresi**

Pengujian Keberartian Regresi dilakukan untuk menguji apakah Koefisien Regresi yang didapatkan signifikan (berarti) atau Tidak. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah berarti.